

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu merupakan suatu rujukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, agar peneliti tersebut memiliki berbagai teori yang dapat digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukannya (Randi, 2018 dalam Z. Muhammad, 2020). Sesuai dengan pendapat tersebut dan berdasarkan judul skripsi ini, sebenarnya penulis tidak dapat menemukan pustaka yang benar-benar mirip berdasarkan judul skripsi ini maupun lokasi yang dijadikan objek penelitian terdahulu. Namun, penulis meyakini bahwa beberapa pustaka yang ditemukan sekiranya dapat dijadikan referensi atau gambaran untuk membantu penulis dalam penelitian ini.

2.1. Penelitian Terdahulu

1. penelitian pertama berjudul “Efektivitas Implementasi Program e-KTP” diajukan oleh Roni Indra Kurniawan dan Sujianto. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan efektivitas implementasi program e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan program e-KTP sudah efektif. Pemerintah Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru mampu berperanan sebagai implementator yang baik.
2. Penelitian kedua berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program eKTP Studi Pelaksanaan Perekaman Data di Kabupaten Hulu Sungai Utara” diajukan oleh Nazaruddin. Fokus penelitian ini untuk menganalisis

efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara Efektivitas belum tercapai, dengan melihat dari pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Serta kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya

3. Penelitian ketiga berjudul "Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat" diajukan oleh Bastiar, Sutadji M, Bambang Irawan. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Dari hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan e-KTP di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditentukan, tetapi dalam pelaksanaannya kurang optimal. Kurang optimalnya implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh terbatasnya

alternatif dan metode sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mengandalkan sosialisasi tatap muka dan baliho, tidak menggunakan media yang lain seperti menggunakan radio, dan leaflet. Kendala teknis seperti kerusakan pada sistem operasional komputer perekaman dan Kendala non teknis di lokasi penelitian seperti lemahnya jaringan internet dan rusaknya perangkat/komponen komputer (hardware) sehingga pelayanan e-KTP mengalami penundaan, sering terjadi pemadaman listrik di Kabupaten Kutai Barat, mengakibatkan proses pendataan dan perekaman data eKTP mengalami penundaan, serta masih terkonsentrasi penerbitan e-KTP di pusat sehingga lambat masyarakat menerima fisik e-KTP. Untuk itu, dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Konsep Utama Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Roni Indra Kurniawan Dan Sujianto (2009)	“Efektivitas Implementasi Program e-KTP”	Untuk Menganalisis Proses Dan Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Efektivitas Implementasi Program E-KTP Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian Menunjukkan Proses Pelaksanaan Program E-KTP Sudah Efektif.	Pemerintah Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru Mampu Berperan Sebagai Implementator Yang Baik.	Pemerintah Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru

Nazaruddin.	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program eKTP Studi Pelaksanaan Perekaman Data di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Elaksanaan Program E-KTP Nasional Di Padang Selatan, Sumatera Barat, Yang Terpilih Sebagai Satu Di Antara Enam Daerah Pilot Projecte-KTP Nasional. Data Memperlihatkan, Target E-KTP Masih Jauh Dari Harapan	Targetnya Mencapai 26.000 Kartu. Penyebab Kegagalan Pencapaian Target Ini Beragam, Diantaranya Permasalahan Komunikasi, Kurangnya Sumberdaya, Struktur Birokratis Yang Rumit Dan Kaku, Serta Penentangan Dari Pihak Lain.	Padang Selatan, Sumatera Barat, Yang Terpilih Sebagai Satu Di Antara Enam Daerah Pilot Projecte-KTP Nasional
Bastiar, Sutadji M, Bambang Irawan	”Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat”	Untuk Mendeskripsikan Dan Menganalisis Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Dan Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.	Sistem Operasinal Komputer Dan Perekaman Dan Kendala Non Teknis Di Lokasi Penelitian Seperti Lemahnya Jaringan Internet Dan Rusaknya Perangkat/Komponen Komputer (Hardware) Sehingga Pelayanan E-KTP Mengalami Penundaan, Sering Terjadi Pemadaman Listrik Di Kabupaten Kutai Barat, Mengakibatkan Proses Pendataan Dan Perekaman Data E-KTP Mengalami Penundaan, Serta Masih Terkonsentrasi Penerbitan E-KTP Di Pusat Sehingga Lambat Masyarakat Menerima Fisik E-KTP	Kurang Optimalnya Implementasi Kebijakan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Kutai Barat

Sumber : Penulis 2024

1.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variable yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrumen penelitian. Variabel yang diteliti dapat dijelaskan melalui pendefinisian, uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber bacaan. Peneliti akan menguraikan secara sistematis teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

a) Teori kebijakan publik dan teori implementasi

1. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Dan berikut ada beberapa kebijakan yaitu:

1. Kebijakan publik sebagai tujuan Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah

serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.
3. Kebijakan publik sebagai hipotesis Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai prilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disensemtif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

2. Teori Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi

kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasi atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistik yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A.

Sabatier ,1979 dalam Solichin Abdul Wahab (2012:135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 21 program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, Dye menjelaskan kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Dunn bahwa istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, yaitu polis (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Selanjutnya, pengertian tersebut dapat dipahami secara lebih luas, Singadila menjelaskan sebagai berikut ini:

- a) Kebijakan Publik, yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (set of choosing) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.
- b) Pelaku Kebijakan, adalah orang sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu dalam kebijakan sebab mereka berada dalam posisi memengaruhi, baik pada perumusan kebijakan, pembuatan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan penilaian atas perkembangan pelaksanaannya.
- c) Lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau kejadian yang menyebabkan timbulnya sesuatu issues atau masalah kebijakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.

Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian kebijakan sebagai ketentuan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi tiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga

tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan. Dari pengertian di atas, pada hakikatnya, kebijakan merupakan kajian terhadap peraturan atau program dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan selalu dihubungkan dengan upaya penyelesaian masalah. Islamy mengemukakan konsep bahwa suatu kebijakan memuat tiga elemen, antara lain:

- 1) Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

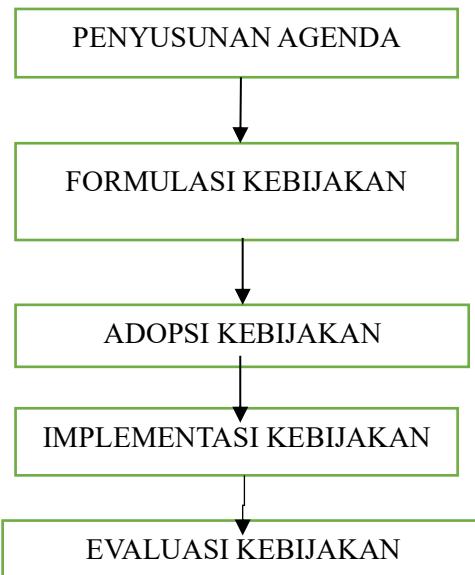
1.1.1 Tahapan-Tahapan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang komplek karena banyak melibatkan proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan public membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik.

Beberapa ahli membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan di bawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan.

Gambar 2.1

Tahap-tahap kebijakan publik Menurut Edward III sebagai berikut :



Sumber : penulis 2024

a) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi diartikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Dalam pemecahan

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/ policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing demi dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang diusulkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif,konsensus antar direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan adminstrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit adminstrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

1.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan, penerapan. Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan dalam Upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliveri policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Menurut Edwards, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi (output, outcome). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan,

pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, dan negosiasi. Implementasi yaitu seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu, guna merealisasi pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas, jadi implementasi itu adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu.

Dalam rumusan Higgns implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lainnya. Menurut Masmanian dan Sabatier bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa mengimplementasikan kebijakan adalah melaksanakan keputusan dalam rangka mengatasi suatu permasalahan melalui langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan, Masmanian dan Sabatier dalam Wahab merumuskan suatu model dasar dalam implementasi kebijakan yang disebut Kerangka Analisis Implementasi. Dimana analisis implementasi kebijaksanaan negara mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses

implementasi. Variabel-variabel tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu :

- 1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- 2) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
- 3) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

1.1.3 Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Dalam implementasi kebijakan publik dikenal juga Model George C. Edwards III. Menurut model yang dikembangkan oleh George C. Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif

masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a) Transmisi

Transmisi (penyaluran) komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (miskomunikasi).

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu. Sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran).

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksanaan kebijakan dilapangan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai.

2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan- aturan suatu kebijakan. Jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif,

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik, antara lain:

- a) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c) Kewenangan, artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat terwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintahan yang lain, dan lain-lain.\
- d) Fasilitas, fasilitas termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan

3. Disposisi (Sikap)

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan

yang ddiharapkan. ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kamauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

- a) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan adminstratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.
- b) Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidak berpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
- c) Intensitas respons atau tanggapan pelaksanaan

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, dalam struktur organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai yang ada dalam organisasi. Ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam struktur organisasi menggambarkan tentang jenis atau tipe organisasi kedudukan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah, koordinasi dan tanggung jawab serta rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan standard operating procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

- a) Standard Operating Prosudures (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang meungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

1.1.4 Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

Sebuah kebijakan publik tidaklah muncul dengan sendirinya dan mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik dalam usaha menggapai tujuan yang telah ditetapkan haruslah melewati beberapa tahapan implementasi begitu juga halnya yang terjadi dengan program e-KTP. Tindakan lanjutan akibat dari munculnya sebuah kebijakan publik adalah implementasi. KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP, hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.

1.1.5 Fungsi Dan Manfaat Kegunaan E-KTP

Menurut Oktaf, ada beberapa fungsi dan manfaat dari penggunaan e-KTP, diantaranya:

- a) e-KTP merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi

setiap penduduk dan terbangunya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat

- b) Mencegah adanya pemalsuan.
- c) Mencegah adanya penggandaan penggunaan KTP.
- d) Kebutuhan untuk mewujudkan keamanan negara.
- e) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- f) Bisa digunakan berbagai kegiatan yang sudah diberlakukan.
- g) Kartu bukti tanda penduduk Indonesia.
- h) Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada dan lain-lain
- i) Pengidentifikasiannya untuk memecahkan suatu perkara kejahatan yang sulit seperti terorisme, pembobolan bank via ATM, pemilikan KTP ganda, dan lain-lain membuat pengembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan.
- j) Lebih awet penggunaanya sampai 10 tahun.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri Indonesia melalui direktorat jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil menambahkan manfaat e-KTP bagi masyarakat, bangsa dan negara yakni diantaranya sebagai berikut:

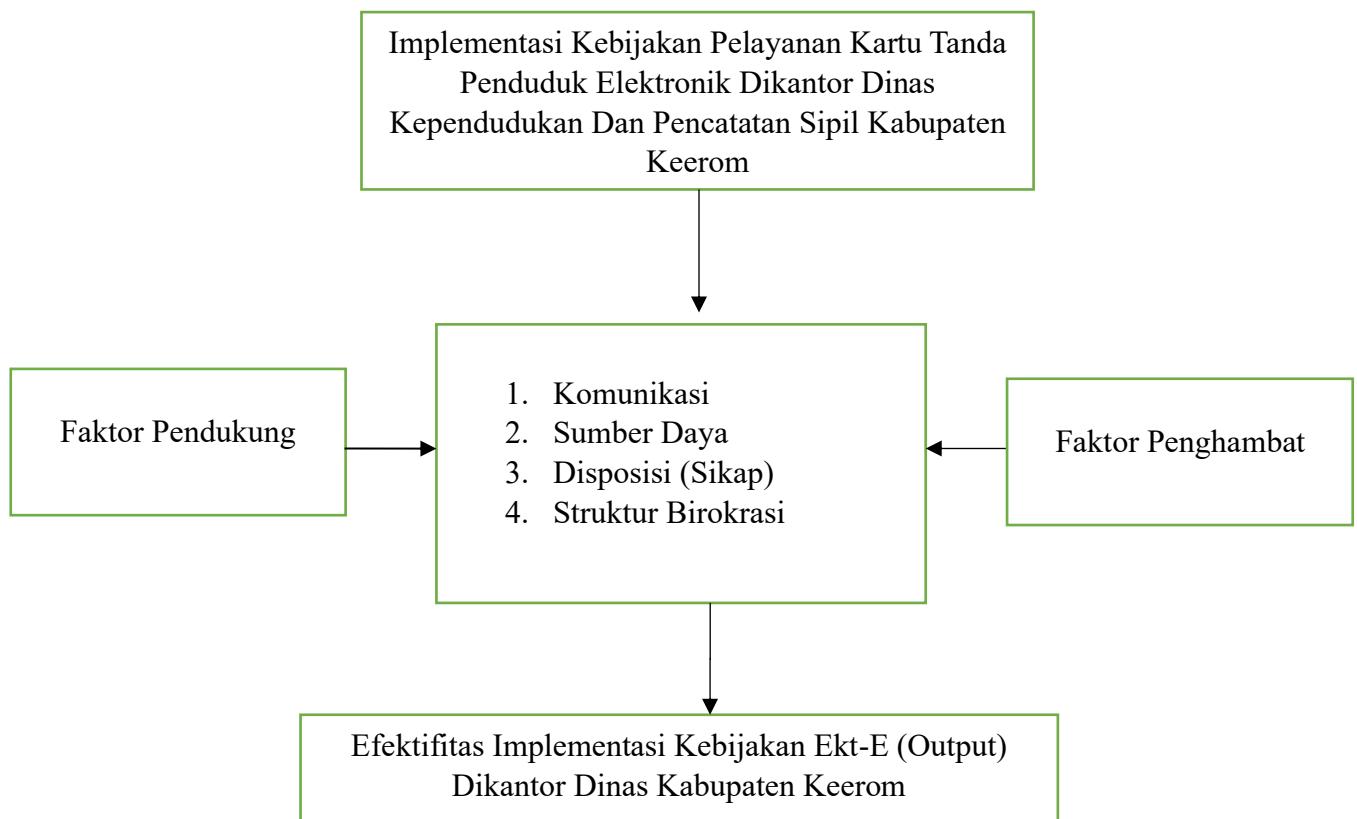
- a) Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- b) Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP Yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi.

- c) Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu.
- d) Bahwa e-KTP merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang di atur dalam UU No.23 Tahun 2006 dan perpres No.26 Tahun 2009, sehingga berlaku secara Nasional ,dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintahan dan swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Menurut Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis Nomor Induk kependudukan secara Nasional dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan tujuan pemerintahan menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara Nasional. Jadi, ada beberapa manfaat dari menggunakan e-KTP, diantaranya dapat menciptakan basis data kependudukan yang lengkap dan akurat, sehingga mampu mencegah adanya penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu atau ganda, dan dapat di pakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada, dan lain-lain serta mampu untuk mengidentifikasi atau memecahkan suatu perkara kejahatan yang sulit seperti tindak pidana terorisme, pembongkran bank via ATM, dan tindak pidana lainnya.

1.2 Kerangka Berpikir Penelitian

Tabel 2.3 kerangka berpikir penelitian



Sumber :Analisis Tahun 2024

1.3 Definisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut/sifat/nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (sugiyono, 2012).

Terdapat dua variable penelitian,yaitu variable terikat (dependent variable) dan variable bebas (independent variable). Variable terikat adalah variable yang tergantung pada variable lainnya, sedangkan variable bebas adalah variable yang tidak tergantung pada variable lainnya.

1. Variabel terikat

Variabel ini adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama penelitian. Menurut (sugiyono,2012) variable dependen sering disebut sebagai variable out put, kriteria, konsekuensi atau atau variable terikat.

2. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.

1.3.1 Definisi Konsep

Implementasi kebijakan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik adalah salah satu tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kemompok untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan dalam pelayanan kartu tanda penduduk elektronik.

1.3.2 Definisi Operasional

Implementasi kebijakan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik adalah salah satu tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kemompok untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan dalam pelayanan kartu tanda penduduk elektronik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom.

Implementasi kebijakan publik menurut teori George C. Edwards III yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan publik dikomunikasikan pada organisasi publik dan terutama pemangku kepentingan bahwa suatu kebijakan publik akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi, maka tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan- aturan suatu kebijakan. Jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. indikator-indikator yang dinilai ialah staf, Informasi dan fasilitas yang tersedia.

3. Disposisi (Sikap)

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan seperti kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Dalam struktur organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai yang ada dalam organisasi. Ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam struktur organisasi menggambarkan tentang jenis atau tipe organisasi:

- 1) Jenis kedudukan dan kewenangan pejabat,
- 2) Bidang dan hubungan pekerjaan yang terkait,
- 3) Garis perintah.

5. Hambatan Implementasi kebijakan Yaitu;

a. Sarana dan Prasarana

Salah satu kendala atau hambatan pembuatan e-KTP adalah alat perkaman percetakan yang ada di kantor Kecamatan Siberut Tengah sering rusak sehingga tidak bisa dilakukan perekaman e-KTP. Kerusakan sarana dan perasarana seperti alat perekam percetakan e-KTP membuat masyarakat terlambat memiliki e-KTP dibanding deerah lain yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan dekat dari perkotaan.

b. Listrik

Pada kantor Kecamatan Siberut Tengah listriknya belum ada sementara Listrik adalah salah satu motorik pelaksanaan perekaman

percetakan e-KTP di Siberut Tengah. Berdasarkan ungkapan Bapak Derikson selaku kepala suku, dan mereka mengatakan bahwa : Dengan kondisi seperti itu, perekaman percetakan e-KTP dilakukan menggunakan genset. Penggunaan genset membutukan persediaan bensin yang banyak sedangkan pasokan bensin susah untuk didapatkan.

c. Jaringan Internet

Ketersediaan jaringan internet belum stabil sementara untuk pelayanan e-KTP sistemnya sangat bergantung akan sistem online untuk pengiriman data hasil perekaman, validasi hingga verifikasi data atas dugaan indentitas ganda.